



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024 BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|--------------|----------|----|---------|-----------|------|
| 1. | RADAR BANTEN | 4. | SATELIT NEWS | JANUARI | 08 | MEI | SEPTEMBER | 2024 |
| 2. | BANTEN POS | 5. | BANTEN RAYA | FEBRUARI | | JUNI | OKTOBER | |
| 3. | KABAR BANTEN ✓ | 6. | | MARET | | JULI | NOVEMBER | |
| | | | | APRIL | | AGUSTUS | DESEMBER | |
| | | | | | | | | |

Pemprov Diminta Selesaikan Temuan BPK

SERANG, (KB).- Tamuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten tahun anggaran 2023 menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten. Bahkan persisian tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (7/5/2024).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, BPK RI sudah menyampaikan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 kepada Pemerintah Provinsi Banten pada Jumat (5/4/2024). Hasilnya, kata dia, Pemprov Banten dinyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Selama tanggal 5 April yang lalu BPK RI menyampaikan laporan keterangan terhadap LHP BPK RI Provinsi Banten melalui DPRD yang di-

paikan tingkat pusat bahwa Banten WTP," ujarnya kepada awak media di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kawasan Pasat Pemerintahan Provinsi Banten (KPSB), Kecamatan Cingur, Kota Serang.

Namun, unsur politisi Partai Golkar dia, dalam laporan tersebut ada catatan temuan yang harus ditindaklanjuti Pemprov Banten dalam waktu dekat ini. "Tentunya kita berdiskusi tata tertib harus menindaklanjuti atas proses LHP BPK dengan catatan-catatan," tuturnya kembali mengingatkan Pemprov Banten.

Dibesit, berdasarkan catatan **Kabar Banten**, temuan BPK terhadap LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023, di antaranya pelaksanaan 21 paket jalan lingkungan pada Dinas PRKP dan 2 redot akomodasi transisi resort Dinas Pariwisata



MANTAN Wakil Kota Tangerang Anief R. Wikaningsih saat mendampingi penjurangan Calon Gubernur Banten di DPPW Partai Aksi Sosial Nasional Banten, Selasa (7/5/2024).*

Bersambung ke halaman 22



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2024
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|---------------------|----------|----|---------|-----------|------|
| 1. | <i>RADAR BANTEN</i> | 4. | <i>SATELIT NEWS</i> | JANUARI | 08 | MEI | SEPTEMBER | 2024 |
| 2. | <i>BANTEN POS</i> | 5. | <i>BANTEN RAYA</i> | FEBRUARI | | JUNI | OKTOBER | |
| 3. | <i>KABAR BANTEN</i> ✓ | 6. | | MARET | | JULI | NOVEMBER | |
| | | | | APRIL | | AGUSTUS | DESEMBER | |
| | | | | | | | | |

● **Pemprov** (Sambungan dari halaman 1)

sebesar Rp 1,3 miliar lebih. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada lima satuan pendidikan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 1,1 miliar.

Kemudian juga soal realisasi belanja modal gedung dan bangunan pada sepuluh perangkat daerah tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi kontrak dan keterlambatan pelaksanaan belum dikenakan denda keterlambatan Rp 2,8 miliar. Termasuk administrasi pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Atas persoalan tersebut, DPRD Provinsi Banten mendesak Pemprov Banten segera menindaklanjuti temuan tersebut dan diharapkan selesai sebelum batas waktu maksimal untuk tindak lanjut temuan. "Saya kira lebih cepat lebih baik, tentu itu menjadi bagian yang dikomitmenkan dalam rencana aksi," tuturnya.

Tidak hanya mendesak,

DPRD Provinsi Banten juga merekomendasikan agar Pemprov Banten terus memperbaiki tata kelola keuangan. "DPRD merekomendasi beberapa hal yang pertama, adalah bagaimana terus dilakukan penguatan, sinkronisasi tata kelola keuangan dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, ketaatan terhadap temuan BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 menjadi penting. Sehingga raihan opini WTP yang didapat Pemprov Banten tidak tercoreng. "Kepatuhan dan ketaatan ini menjadi salah satu bagian yang harus dikonsolidasikan di seluruh OPD, agar senantiasa WTP," katanya.

Menurut dia, semua organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Banten terus melakukan koordinasi, termasuk dengan DPRD Provinsi Banten sebagai mitra kerja dalam menjalankan program kerja. "Bagaimana proses

kesinambungan antara OPD dan mitra kerja dalam hal ini DPRD bisa bersama-sama sinkronisasi dan melaksanakan terhadap apa yang menjadi bagian atas dasar rekom dan catatan LHP BPK RI," tuturnya.

Ia berharap tata kelola keuangan Pemprov Banten terus semakin baik. "Saya kira satu proses tata kelola keuangan yang baik di Provinsi Banten ini terus disempurnakan dengan baik agar senantiasa bahwa Provinsi Banten mampu dan WTP bisa menjadi dasar tata kelola keuangan yang baik," katanya.

Untuk diketahui, Persoalan temuan BPK atas LKPD Provinsi Banten tahun anggaran 2023 itu juga sempat dikonfirmasi **Kabar Banten** ke Plt Inspektur Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara pada Senin (22/4/2024). Namun, Usman irit bicara. Ia hanya berkata sudah dikoordinasikan. **(Irfan Muntaha)*****